

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KELURAHAN
TANJUNG HARAPAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
KABUPATEN NUNUKAN**

Disusun dan Diususlkan Oleh

JUSRIAH

Stambuk : 105610463413



**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KELURAHAN
TANJUNG HARAPAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
KABUPATEN NUNUKAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diusulkan Oleh

JUSRIAH

Stambuk : 105610463413

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan
Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan**

Nama Mahasiswa : **JUSRIAH**

NIM : 10561 04634 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si.

Pembimbing II



Hj. Andi Nuraeni Aksa, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan

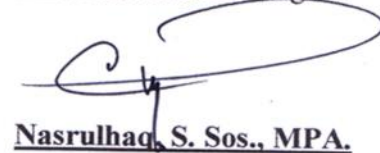
Fisip Unismuh Makassar



Dr. Hj. Iyani Malik, S.Sos., M.Si.

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Nasrulhaq, S. Sos., MPA.

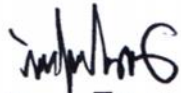
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1200/FSP/A. I-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara. Di Makassar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

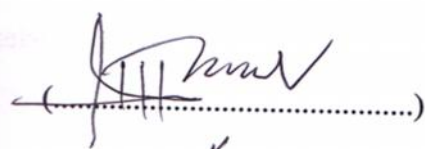

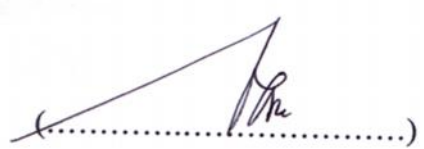
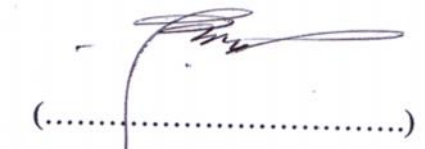


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr.H. Muhammadiyah, MM (Ketua)  (.....)
2. Abdul Kadir Adys, SH, MM  (.....)
3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH  (.....)
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M. Si  (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : JUSRIAH

Nomor Stambuk : 10561 04634 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 Maret 2018

Yang Menyatakan,



JUSRIAH

ABSTRAK

Jusriah . Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar (dibimbing oleh Mappamirng dan Nuraeni Aksah).

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang semaksimal mungkin maka ke depan perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara pemerintah dengan masyarakat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami metode yang dilakukan dinas pemberdayaan dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Nunukan. Informan ditentukan secara *purposive sampling* berdasarkan karakteristik informan yang telah ditetapkan yaitu pegawai dinas pemberdayaan dan masyarakat pesisir yang hidup di wilayah tersebut. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui berbagai tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, waktu dan teknik.

Peneliti mengobservasi dan wawancara informant untuk mengambil data. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan bahwa kurangnya anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Nunukan sehingga Dinas Pemberdayaan sulit dalam mengembangkan program-program yang telah tersusun secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas pemberdayaan kurang memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat pesisir yang berada di Kelurahan Tanjung Harapan. Sementara masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dalam mengelola hasil laut di Nunukan Selatan.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakukltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Rasa sayang dan hormat serta ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda Rafiq serta Ibundaku tercinta hj Marale yang telah memberikan ridhanya kepada penulis dan do’a tulus yang tak henti-hentinya ditujukan buat penulis, tak aka nada sebuah rangkaian penulisan skripsi seperti sekarang ini tanpa ridha dari orang tua penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada segenap keluarga yang turut membantu penulis menyelesaikan studi dengan berbagai dukungan yang diberikan baik itu berupa materi maupun non materi. Terima kasih juga penulis ucapkan kakakku tersayang Jumriah, Hamriah, Sakariah, dan Sulfaidah yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan studiku.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ayahanda Dr. H, Mappamaring, M. Si selaku Pembimbing I dan Ibunda Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH selaku Pembimbing II yang selama ini memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis, yang sabar dan tulus membimbing penulis dengan segala kekurangannya, baik itu dalam bentuk diskusi, arahan, kritik dan saran yang sangat konstruktif sejak usulan seminar proposal penelitian hingga berlangsungnya ujian skripsi, serta menjadikan penulis sebagai mahasiswa yang mampu menggapai gelar sarjananya. Tak lupa pula penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu \politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis sejak penulis menduduki bangku perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga sekarang ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membimbing dan membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selam mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Seluruh pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang turut memberikan sumbangsuhnya dalam proses penyelesaian studi penulis di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada teman-teman program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2013, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
7. Kepada temanku Apriyanti Pratiwi, Husen Rahim, Rahmat Jayardi, Arjuna Putra, Hasan Rahim, Hendrawan, Anti sbl Mamolo, Hamdan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya yang baik selama ini.
8. Kepada para informan penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas keterlibatannya dalam proses wawancara dari berbagai pihak yang turut berpartisipasi terkait penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang penulis butuhkan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Skripsi ini telah penulis susun sedemikian rupa, namun penulis sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangsuh dari para pembaca baik itu berupa kritik maupun saran yang sifatnya membangun, demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Akhirul qalam, segalanya penulis kembalikan kepada Allah SWT.

Sebagai konsekuensi penghambaan secara totalitas semata-mata kepada-Nya.
Semoga keikhlasan dan bantuan yang diberikan walau sekecil dzahrah pun
memperoleh balasan di sisi-Nya (Amin).

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khaerat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 17 Juni 2018

Jusriah

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep dan Terori Pemberdayaan	11
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	11
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.....	16
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	20
4. Peluang Pemberdayaan Masyarakat.....	24
5. Pengertian Masyarakat Pesisir	25
6. Peran Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	26
7. Pengertian Desa dan Aparatur Desa.....	27
8. Tugas dan Wewenang Aparatur Desa	29
B. Kerangka Pikir	32
C. Fokus Penelitian	32
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitaian	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengabsahan Data	38

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
1. Sejarah Singkat Kabupaten Nunukan.....	40
2. Letak Geografis Kabupaten Nunukan.....	41
3. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan.....	42
B. Keadaan Demografis.....	48
C. Hasil Peneltian Berdasarkan Empat Indikator Yang Digunakan	52
1. Keputusan dan Inisiatif	55
2. Memperkuat Kemampuan Masyarakat	56
3. Toleransi.....	58
4. Proses Belajar Mengajar	59
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan	60
1. Faktor Pendukung	60
2. Faktor Pengambat	62

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN	70

DAFTAR PUSTAAKA.....	73
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan adalah salahsatu wilayah dari Kabupaten Nunukan yang memiliki potensi sumberdaya perairan untuk mengembangkan usaha dibidang perikanan (budaya tangkap).Pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya perairan pantai di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan diarahkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya secara efektif,efesien,optimal, dan berkelanjutan melalui program pemberdayaan masyarakat. Menurut Pattiasina (2010), pemberdayaan atau *empoweent* merupakan sebuah ide yang dapatkan sebagai bagian dari perkembangan dan pemikiran serta kecenderungan masyarkat.

Kecenderungan primer adalah pemberdayaan yang fokus pada pelaksanaan atau sebagai kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan pada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses atau sebagai kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan pada masyarakat agar individu lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses simulasi, mendororng atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apayang menjadi pilihan mereka. Memberdayakanmasyarakat adalah

upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah, yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan pertanggung jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Perlunya dituntut peran aparatur desa. Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir yang berada di Kelurahan Tanjung Harapan Peneliti melihat masih kurang atau minimnya peran aparatur desa dalam pemberdayaan tersebut, khususnya dalam pemberian penyuluhan kepada masyarakat, minimnya bantuan dana berupa perbaikan infrastruktur, serta minimnya bantuan alat tangkap nelayan kepada masyarakat pesisir, tidak terlepas dari itu peran aparatur desa pun sangat diharapkan khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, adapun program pemerintah tersebut akan berjalan sesuai yang diharapkan ketika tidak terlepas dari peran partisipasi masyarakat guna mensukseskan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pesisir yang berada di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan tanggung jawab dari aparatur Desa kepada masyarakat untuk memberi pelayanan ataupun bantuan. Dalam konteks ini masyarakat sebagai aktor utama pembangunan,

sedangkan aparatur desa berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003:75-76). Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005, pada pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang bahwa dalam sebuah Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu

sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing.

Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel. Guna melihat bagaimana kegiatan masyarakat utamanya masyarakat pesisir dan kegiatan aparatatur Desa dapat terjadi sinkronisasi yaitu saling bersentuhan, menunjang dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Suasana tersebut dapat diciptakan jika aparatur Desa memiliki semangat pengabdian tinggi dan profesional dalam pemberian layanan publik. Pada sisi lain perkembangan dan perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, menjadikan para pelaku birokrasi (aparatur) semakin ditantang dan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat utamanya pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemerintah desa yang diberikan hak otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang atau mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintah

RI yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi ditetapkan dalam pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 Km, sudah tentu memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang sangat besar harus adanya peranan aparatur untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Potensi sumber daya perikanan laut setiap tahunnya adalah sebesar $\pm 6,7$ Juta ton, namun yang sempat dimanfaatkan hanya $\pm 47\%$. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang paling banyak memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia karena ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, tumbuh karang, padang lamun, serta estuaria yang sangat luas dan beragam. Selain itu, wilayah pesisir laut Indonesia juga kaya akan bahan tambang dan mineral, sebagai pusat pengembangan industri pariwisata, agrobisnis dan agroindustri, permukiman, transportasi serta kepelabuhanan.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah, baik dalam hal pengaturan dan pengembangan kebijakan, pengaturan penyediaan, peruntukan, penggunaan,

pengelolaan dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika, serta mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.

Konsideran Menimbang Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditetapkan bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling memengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, dengan langkah-langkah konservasi.

Sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, maka pengelolaan sumber daya harus dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya. Pemerataan dimaksud adalah mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakat, yang meliputi:

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan
- 2) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum
- 3) Hak untuk memperoleh rasa aman
- 4) Hak untuk memperoleh akses akan kebutuhan hidup yang terjangkau
- 5) Hak untuk memperoleh keadilan. Tanpa pemenuhan hak dasar tersebut, akan sulit diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kelautan.

Namun disadari ataupun tidak disadari kawasan pesisir merupakan kawasan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat dinamis. Di berbagai daerah, termasuk pada masyarakat yang berada di wilayah pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan. Merupakan kawasan pesisir yang sangat strategis, namun dalam pengelolaannya saling tumpang tindih antara kebijakan pemerintah desa. Hal inilah kemudian memicu terjadinya permasalahan-permasalahan lingkungan, kerusakan sumber daya, dan ketidak mampuan daya dukung lahan untuk menopang aktivitas kehidupan di kawasan tersebut. Untuk itu, diharapkan adanya perhatian aparat desa dalam pemberdayaan pesisir. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam, termasuk sumber daya alam laut dan pesisir harus dikelola dengan sistem berwawasan lingkungan berdasarkan norma hukum dengan memerhatikan tingkat kesadaran dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasinya kedalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya yang menjadi permasalahan hampir setiap wilayah pesisir Indonesia adalah kemiskinan dan keterbelakangan baik dalam hal kesejahteraan maupun tingkat pendapatan perkapita, apabila dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan sebagainya. Menurut Dahuri (2001) citra kemiskinan masyarakat pesisir yang sesungguhnya yang menjadi sesuatu ironi, mengingat Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Didalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir dan

keluarganya. Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, budidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya dimana sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya laut merupakan segmen anak bangsa yang umumnya masih tergolong miskin. Kesejahteraan masyarakat pesisir memerlukan program terobosan baru yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap modal, manajemen dan teknologi serta dalam mentransformasikan struktur dan kultur masyarakat pesisir dan dari masyarakat serta berkelanjutan.

Salah satu fenomena yang terjadi di wilayah pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan adalah pemberdayaan masyarakat melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri disektor kelautan dan perikanan (PNPM KP) sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin kelautan dan perikanan yang tergabung dalam kelompok usaha yaitu penangkapan ikan, usaha pengolahan hasil perikanan dan usaha budidaya rumput laut. Adanya program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan program tersebut harus sepenuhnya dievaluasi sebagai salah satu upaya perbaikan dan pembanguan dalam pengolaanya, sehingga tujuan dari program tersebut dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat pesisir. Namun berdasarkan pengamatan perogram ini belum sepenuhnya mampu menanggualangi tingkat kemiskinan masyarakat pesisir dan tidak adanya pelayanan yang memadai yang ada di Kabupaten Nunukan antara lain :

- a) Kurang adanya kesadaran aparat pemerintah terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat.

- b) Pengorganisasian tugas pelayanan belum serasi sehingga terjadi kesimpang siuran penanganan tugas karena tak ada yang menangani.
- c) Tidak tersediannya sarana pelayanan yang memadai.
- d) Adanya pilih kasi dalam pemberian pelayanan.
- e) Masih kurangnya petugas pelayanan.
- f) Tidak adanya pelatihan pengolahan sumber daya laut yang dilakukan oleh insitusi yang terkait, dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

Sehubungan hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam memberdayakan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
- 2) Apa faktor yang mendukung dan penghambat terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam memberdayakan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan

2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan penghambat terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan kabupaten Nunukan

D .Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini:

1. Bagi masyarakat pesisir

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung Harapan dapat mengelolah hasil-hasil alam yang ada dengan baik dan menciptakan manusia yang produktif serta membangun infrastruktur yang ada di Kelurahan Tanjung Harapan seperti sarana dan prasarana dalam peningkatan jumlah pendapatan di Kelurahan Tanjung Harapan.

2. Bagi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan pemerintah daerah di Kelurahan Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat

3. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai bekal untuk penelitian selanjutnya

4. Untuk lembaga Univesitas Muhammadiyah Makassar

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dalam segmen yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsep dan Teori Pemberdayaan

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut David C. Korten (2013), pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya menawarkan suatu proses perencanaan pembangunan dengan memusatkan pada partisipasi, kemampuan dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, maka masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang mereka lakukan. Hal ini memiliki arti, menempatkan masyarakat sebagai aktor (subyek) pembangunan dan berpartisipasi guna menyukseskan pemberdayaan tersebut. Serta David C. Korten mengemukakan konsep pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya memiliki beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibuat di tingkat lokal.
2. Fokus utama adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengawasi dan mengarahkan asset-asset untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi daerah mereka sendiri.
3. Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan mengakui arti penting pilihan nilai individu dan pembuatan keputusan yang telah terdistribusi.

4. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sosial dimana individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris.

Pemberdayaan, secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Sebagaimana pendapat Edi Suharto (2005), pemberdayaan sangat tergantung dua hal :

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*Empowerment*" yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan

peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri. (Soetomo, 2006)

Secara fungsional, pemberdayaan masyarakat adalah upaya melegitimasi dan memperkuat segala bentuk gerakan masyarakat yang ada, gerakan kesejahteraan mandiri masyarakat dengan ujung tombak LSM, gerakan protes masyarakat terhadap dominasi dan intervensi birokrasi negara, kewenangan dunia industri, gerakan moral, yang bermaksud memberikan moral kepada kekuatan (*force*) yang menjadi andalan hubungan sosial dan tiga dekade terakhir. Upaya pemberdayaan rakyat mencakup tiga-P yaitu:

1. Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat
2. Penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
3. Pelayanan yang berfungsi sebagai pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan oleh masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People Centered Development*). Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material yang penting melalui retribusi modal atau kepemilikan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan, dalam arti bukan hanya bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari

kemiskinan. Tujuan pertama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas dari struktur sosial yang tidak adil) untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui sebagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sarana perubahan (misalnya pemberdayaan keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Edi Suharto, (2009) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individu yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri orang lain.
3. Pemberdayaan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktu-struktur yang masih menekan.

Parsons et.al.(2008), menyatakan bahwa “proses pemberdaayaan umumnya dilakuakn secara kolektif.” Menurutnya tidak ada literature yang

menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan masyarakat setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan diri masyarakat, hal ini bukanlah strategis utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerja sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategis pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual meski pada gilirannya strategis inipun tetap berkaitan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan masyarakat dengan sumber atau system lain dari luar dirinya. Dalam kontek pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga hal arus atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*):

a) Aras Mikro.

Pemberdayaan dilakukan teradaap masyarakat secara individu melalui bimbingan, konsling, stres management, krisis intervention, tujuan utama adalah membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan.

b) Aras Mezzo.

Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat. Pemberdayaan dilakuakn dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasa digunakan sebagai strategis dalam meningkatkn kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkn permasalahan yang dihadapinya.

c) Aras Makro.

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategis system besar (large-system strategi), karena sasaran perubahan diharapkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, perorganisasian masyarakat.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir dan lautan menurut (Yunus p. Paulangan 2009)

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
- b. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan dan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan laut.
- c. Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan.
- d. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan laut.

Berdasarkan konsep pembangunan masyarakat yang menekan pada pemberdayaan maka di formulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan, pengolah, dan pedagang hasil laut yang tinggal dikawasan pesisir pulau kecil dan besar, yang adalah sebagai berikut:

1. Tersediannya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan.

2. Tersedianya prasarana dan produksi secara local yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.
3. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
4. Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif didaerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumber daya lokal, memiliki pasar yang jelas, dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian.
5. Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antara kawasan pesisir dan pedalaman.
6. Terwujudnya struktur ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi diwilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

Program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang bedasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.

Pertanyaan kemudian muncul apakah konsep pemberdayaan yang salah atau pemberdayaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu dari golongan orang?

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan masyarakat lainnya karena didalam habitat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan lain diantaranya:

- a. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Karena kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal atau peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapnya.
- b. Masyarakat nelayan buru, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir .ciri-ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu di kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal dan peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh

atau anak buah kapal dengan kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.

- c. Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat buruh. Setiap sekelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktifitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap, berbedah dengan masyarakat pesisir lainnya.

Namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus menyentuh kelompok masyarakat sasaran, persoalan yang harus dijawab adalah bagaimana memberdayakannya?

Banyak program pemberdaayaan yang telah dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. Pada intinya program ini dilakukan tiga pendekatan yaitu:

- a. Kelembagaan Bahwa untuk memperkuat posisi masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam satu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya pengguliran dan produktif diantara kelompok lainnya.
- b. Pendampingan Keberadaan pendamping, memang sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang belum dapat berjalan sendiri, mungkin kekurangan tingkat penguasaan ilmu yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka

karena belum pulinya rasa percaya diri mereka akibat pradigma-pradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua. Peran pendampingan sangatlah penting terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktifitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.

c. Dana usaha produktif bergulir

Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati didalam forum atau lembaga yang dibentuk masyarakat itu sendiri dengan fasilitas pemerintah setempat.

3. Strategi pemberdayaan masyarakat

Strategis pemberdayaan adalah berusaha untuk mewujudkan kondisi sebaiknya, yaitu kondisi *social inclusion*. Itulah sebab perubahan diharapkan tidak hanya perlakuan pihak eksternal terhadap masyarakat local sebagai kesatuan, akan tetapi juga pula pola perubahan reaksi sosial dalam struktur sosial masyarakatnya. Secara eksternal, Negara dengan pihak terkait lainnya perlu memberikan kewenangan dan peluang pada masyarakat lokal untuk menentukan sendiri hal-hal yang menyangkut kehidupannya. Sementara tingkat internal komunitas, akses dan peluang yang setara juga perlu diberikan kepada lapisan masyarakat bawah. Apabila faktor structural dan intitusional yang menjadi

penyebab lapisan tertentu berbeda dalam kondisi marginal, maka proses pemberdayaan diharapkan juga mampu dapat mendorong transformasi struktural dan perubahan institusional. Dengan demikian diskriminasi dan institusional dapat dihilangkan. Seluruh lapisan masyarakat terutama lapisan bawah dapat peluang yang setara dalam berpartisipasi dalam semua proses kehidupan, dalam mengakses semua pelayanan, serta dalam mengakses informasi dan sumberdaya. Sianipar J. PG 2000.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara,

1. Penguatan akses mencakup akses hukum, akses informasi, dan akses ekonomi
2. Penguatan hak yang mencakup: hak akses (*right of access*) kawasan wisata pesisir, hak pemanfaatan (*right of withdrawal*), dan hak pengelolaan (*right of management*),
3. Penguatan kelembagaan untuk menentukan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang mencakup: nilai sosial, norma, organisasi (*players of the game*), kontrol(*control*), insentif, dan kebutuhan(*needs*).

Program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi faktual di wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

1. Program Ekowisata
2. Nelayan

3. Budaya lokal
4. Keterampilan
5. Kerajinan rakyat
6. Teknologi tepat guna.

Pemberdayaan (*Empowerment*) yang dikatakan oleh Oakley dan Marsden dalam Priyono, (2001) diartikan sebagai suatu proses yang memiliki dua kecenderungan:

- a. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan. Kekutan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pengembangan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan primer darimakna pemberdayaan.
- b. Kedua, atau kecenderungan sekunder, menekankan pada proses simulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Adapun dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat maka kerjasama dapat terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan, yakni perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program tersebut. Selain itu, kedua belah pihak juga harus dapat

bersama-sama menikmati hasil dari pelaksanaan program secara adil terutama bagimasyarakat kecil.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Agar tujuan ini tercapai, maka diperlukan kajian strategis yang berkesinambungan tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo, dan makro. Hal ini ditujukan agar masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa mengalamim hambatan eksternal pada strutur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berubah struktur pemerintah regional setingkat kabupaten, kota dan provinsi. Sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat dan nasional (Hikmat : 2001).

Proses pemberdayaan (*empowerment*) ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan dan mengontrol diri yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri. Untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dan lingkungannya.

Pelaksanaan program pemberdayaan sangat diperlukan kerja sama antara berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu kerjasama yang serasi dan seimbang dan saling menguntungkan akan dapat menjaga kesinambungan dan keberlanjutan

sebuah program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan juga masyarakat dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara berbagai pihak dalam menyukseskan pelaksanaan program pengembangan masyarakat.

4. Peluang Pemberdayaan Masyarakat

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendampingan dituntut tidak hanya mampu menjadi menejer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengolah dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

1. Komponen primer, yakni komponen kegiatan/usaha yang terlibat langsung dengan pelayanan pengunjung seperti misalnya akomodasi, pelayanan makanan/minuman dan pengelolaan atraksi. Khusus mengenai perusahaan akomodasi, berbicara pada skala komersial, komponen ini relatif membutuhkan investasi yang tinggi, jaringan pemasangan yang luas dan sistem pengelolaan yang profesional.
2. Komponen pendukung, yakni komponen kegiatan atau usaha yang menunjang penyelenggaraan pelayanan terhadap pengunjung, seperti misalnya hasil-hasil pertanian untuk konsumsi pengunjung, pembuatan cenderamata, pelayanan transfer lokal. (Soetomo, 2006)

Komponen ini apabila dikelola dengan baik dan benar, akan memberikan dampak ekonomi yang tinggi bagi masyarakat luas. Berdasarkan kedua komponen

tersebut maka menyangkut kesempatan kerja bahwa dengan melalui pengembangan pariwisata akan terbuka sejumlah peluang kerja, tidak perlu dipertanyakan lagi. Lapangan kerja baru akan terbuka dengan bertumbuhnya komponen primer. Dan seiring dengan peningkatan kegiatan/ usaha komponen pendukung otomatis penyerapan tenaga kerja di sektor pendukung akan bertambah. (Moelyarto, 2003 : 37-38).

5. Pengertian Masyarakat Pesisir

Menurut Dahuri dkk, (2001) wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), suatu wilayah pesisir (pantai) memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batasan yang sejajar garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*).

Wilayah pesisir adalah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik yang kering maupun yang terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan bagian yang menuju arah laut wilayah pesisir adalah mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti dimentasi dan aliran air tawar atau aktifitas manusia di darat misalnya pencemaran dan penggundulan hutan (Roesmidi,(2008).

Menurut Nontji (2005), wilayah pesisir adalah pertemuan antara daratan dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan ke arah laut

mencangkup bagian laut yang masih di pengaruhi oleh prose salami yang ada di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar serta daerah yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan.

Sumber daya wilayah pesisir terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi berbagai biota laut yang tumbuh dan hidup disekitar wilayah pesisir termasuk terumbu karang. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui meliputi minyak, gas, mineral, batu-batuan, pasir dan sebagainya. Masyarakat pesisir, umumnya dikenal sebagai masyarakat nelayan (penghasil ikan) baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Kelompok masyarakat nelayan dalam skala besar adalah mereka yang melakukan pembudidayaan ikan yang umumnya di tambak, sedangkan kelompok yang berskala kecil adalah mereka yang dalam menghasilkan ikan atau yang dipersamakan dengan itu sangat bergantung pada penangkapan langsung dilaut. Meski kedua kelompok masyarakat pesisir tersebut sama-sama sebagai penghasil ikan atau yang sejenis atau yang dipersamakan dengan itu, namun titik perbedaannya adalah terletak pada pola kerjanya.

6. Peran Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam hal ini adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan sebagai salah satu kelompok masyarakat yang mengembangkan kehidupan di perairan laut dan hidup dalam kondisi marginal yang di harapkan dapat memperbaiki akses terhadap modal, informasi dan teknologi perikanan sehingga

masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan dapat lebih mudah memasarkan hasil perikanannya. Dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Menurut moenir (1995;12) timbulnya pemberdayaan masyarakat disebabkan faktor ideal material, faktor ideal terdiri dari:

1. Rasa cinta dan kasih sayang. Manusia diciptakan lengkap dengan perasaan saling mencintai, saling menyayangi, perasaan inilah yang menyebabkan orang rela berkorban demi orang banyak.
2. Tolong menolong sesamanya. Keterbatasan dalam segala dimensinya juga menyertai dengan kehadiran manusia di dunia ini sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Hal ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat
3. Berbuat baik adalah ciri khusus yang membedakan manusia dengan makhluk lain didunia ini, adalah adanya sifat untuk berbuat kepada sesamanya. Hal ini adalah bentuk lain dari pelayanan.

7. Pengertian Desa dan Peran Aparatur Desa

Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang terdiri dari sekretaris dan perangkat desa lainnya. (Adisasmito, 2006).

Kata aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara. Padahal arti kata itu lebih luas sebab menyangkut seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelolah kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan (Widjaja, 2003)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lain.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

8. Tugas dan Wewenang Aparatur Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota. Landasan

pemikiran dan pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, heterogen, maka otonom desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan kembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum privat, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Serta pemberdayaan masyarakat juga didukung dengan adanya peraturan lain yaitu Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kemudian dijelaskan Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

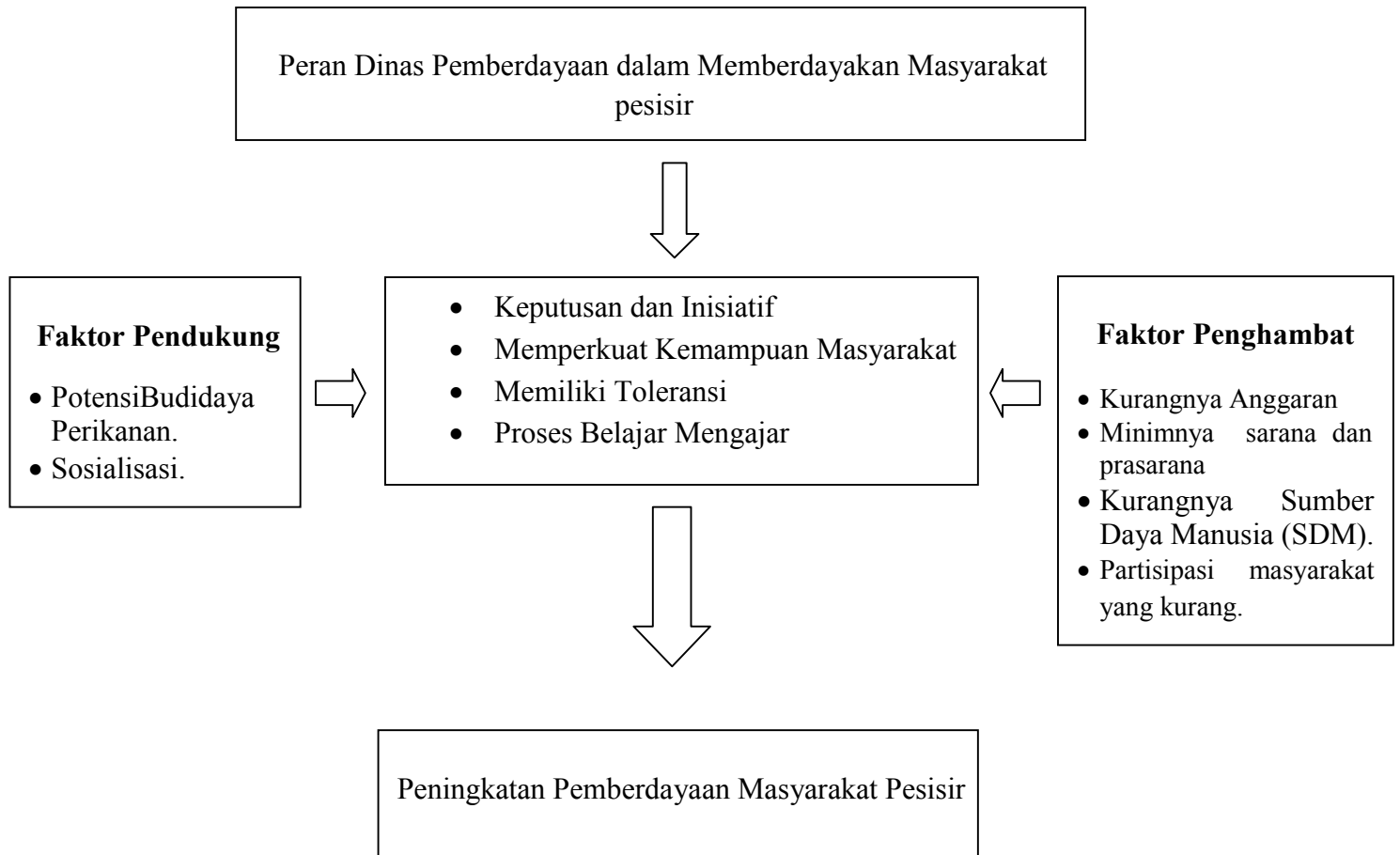
B. Kerangka Pikir

Tujuan pembinaan pada dasarnya tidak lain untuk menghasilkan masyarakat kreatif dalam arti bertambah, berkembang dalam pengetahuan, keterampilan dan sifat motivasinya dan dapat mengaplikasikannya kedalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ada 6 jenis pembinaan menurut Lundgren (2001) yaitu :

- a. Pembinaan orientasi
- b. Pembinaan kecakapan
- c. Pembinaan pengembangan keperibadian
- d. Pembinaan kerja
- e. Pembinaan penyegaran
- f. Pembinaan lapangan

Secara singkat kerangka pikir peneliti ini dapat dilihat dari bagan berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



Gambar 1.1

Teori Corthen 2013

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini memfokuskan pada kinerja aparatur dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

a. Keputusan dan inisiatif

Keputusan dan inisiatif yang dimaksud adalah seperti apa kinerja dinas pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal yaitu di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan dan pengelolaan pembangunan desa.

b. Memperkuat Kemampuan Masyarakat

Memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengawasi dan mengarahkan asset-asset untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi daerah mereka sendiri.

di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan yang perumusannya dilakukan melalui perencanaan program.

c. Memiliki Toleransi

Memiliki terhadap perbedaan dan mengakui arti penting pilihan nilai individu dan pembuatan keputusan yang telah terdistribusi. Serta Pemberian bantuan operasional berupa dana yang dapat dipergunakan oleh masyarakat nelayan sebagai modal.

d. Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar yang dimaksud adalah antara dinas pemberdayaan selaku pemberi layanan dengan masyarakat pesisir Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sosial dimana individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan selama dua bulan mulai tanggal 27 Desember 2017 s/d 27 Februari 2018. Adapun lokasi-lokasi yang ingin dikunjungi yakni kantor pemberdayaan masyarakat, masyarakat pesisir Tanjung Harapan. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena peneliti ingin memberdayakan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui kinerja pemerintah daerah terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan.
2. Tipe penelitian ini menggunakan tipe studi kasus yaitu untuk memberikan gambaran kasus yang dialami masyarakat akibat kinerja pemerintah daerah di Kelurahan Tanjung Harapan.

C. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung dilokasi yang menjadi objek penelitian dan wawancara langsung secara terbuka sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis memakai buku-buku yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

D. Informan Penelitian

Adapun informan pada penelitian ini adalah:

Tabel informan I.2

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	Jumianti S.Sos	JM	Kepala Pemberdayaan	1
2	H. Burhanuddin ST	BD	Skertaris Dinas pemberdayaan	1
3	Muhammad Tahir	MT	Kepala Desa	1
4	Muhammad akil	MA	Sekertaris Desa	1
5	Yunus	YN	Masyarakat	1
	Rosna	RN	Masyarakat	1
5	Muhtar M	MM	Masyarakat	1
JUMLAH				7

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan data yang dilakukan melalui pengamatan penulis secara langsung di lapangan mengenai pemberdayaan yang diterapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan.
- b. Wawancara adalah dimana penulis melakukan interview atau wawancara terhadap apa yang dilakukan tim pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir dalam perkembangan di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.
- c. Studi kepustakaan (Dokumen) adalah dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini tentang permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti meliputi data pemberdayaan masyarakat pesisir.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles and Huberman (Dalam Sugiyono, 2012:91-99) menjelaskan bahwa analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan wilayah pesisir dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir di desa Tanjung Harapan yang diterapkan dalam pengembangan berbentuk teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir yang diterapkan dalam pengembangan wilayah pesisir yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2014:127), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan yang dikatakan umum dengan yang dilakukan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau koesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik yang lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Deskripsi objek penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan Kabupaten Nunukan tertuang dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Kelurahan Tanjung Harapan merupakan salah satu kelurahan yang ada dan masuk dalam wilayah Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Kelurahan Tanjung Harapan merupakan pemekaran dari Desa Nunukan Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Selisun, Kelurahan Mansapa, dan Kelurahan Tanjung Harapan Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Nunukan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2007 Nomor 08 Seri D Nomor 06).

2. Letak Geografis Kabupaten Nunukan

Kelurahan Tanjung Harapan memiliki luas wilayah 107,01 Km² atau 61,23 % dari luas wilayah Kecamatan Nunukan Selatan, yang terdiri 2 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT).

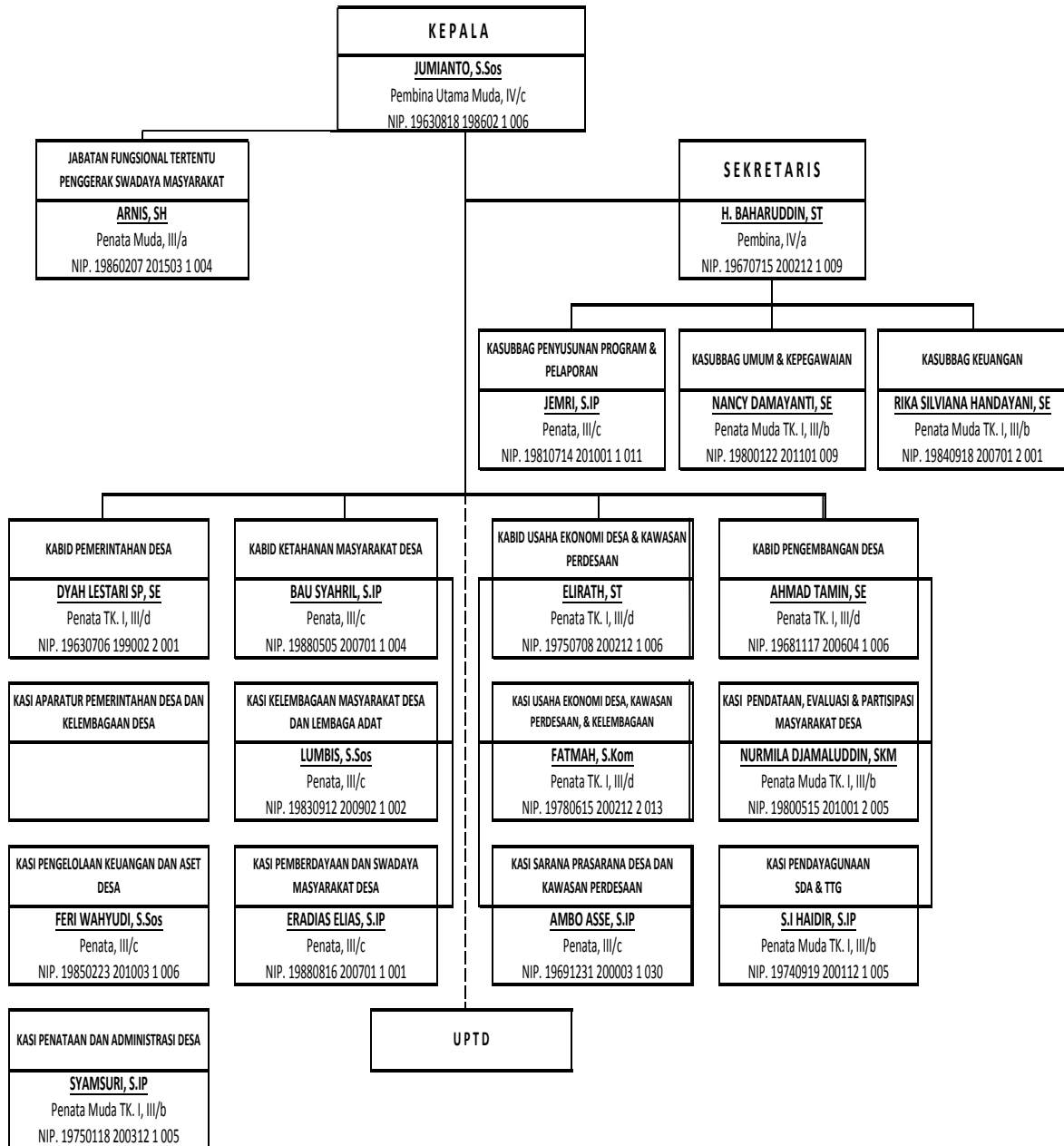
Jika dilihat dari batas-batas wilayah dan posisinya, Kelurahan Tanjung Harapan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Mansapa
- b) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sebatik atau (Selat Nunukan)
- c) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kabupaten Tanah Tidung
- d) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Binusan dan Desa Tepian

Secara topografi, Kelurahan Tanjung Harapan terdiri dari daerah pantai sampai dengan perbukitan. Dengan mata pencarian masyarakat sebagian besar adalah di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan.

3. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan

a. Struktur Organisasi



b. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya kemandirian masyarakat kabupaten Nunukan yang kreatif dan inovatif

2. Misi

- a) Mengembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri dengan :
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan
 - 2) Mengembangkan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa
 - 3) Memantapkan dan meningkatkan keswadayaan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat melalui penguatan kelembagaan aparatur di tingkat pedesaan
- b) Penciptaan teknologi dimasyarakat dapat dikembangkan menjadi teknologi baru, dimana masyarakat dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan penuh inovatif

c. Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten

Nunukan

NO	NAMA/NIP	GOL.RUANG	JABATAN	IJAZAH	CATATAN PENGAWASAN
1	JUMIANTO, S. Sos	PEMBINA TK.I IV/b	KEPALA BADAN	S1	PNS.D
	NIP. 19630818 198602 1006				
2	H. BAHARUDDIN, ST	PEMBINA TK.I IV/b	SEKRETARIS	S1	PNS.D
	NIP. 19670715 200212 1 009				
3			KABID USAHA EKONOMI DAN PEMUKIMAN		PNS.D
4	ARI SUWAGIS TUTI, SS	PEMBINA IV/a	KABID	S1	PNS.D
	NIP.19760904 200212 2 005		PENGEMBANGAN DESA		
5	Hj. SITI HASNAH, SE	PENATA TK.I III/d	KABID KETAHANAN MASYARAKAT	S1	PNS.D
	NIP. 19780911 200212 2 013				
6	ANDI NILAWATI, ST. M.AP	PENATA TK.I III/d	KASUBBID TATA	S2	PNS.D
	NIP. 19770524 200312 2 009		PEMUKIMAN KEL/DESA		
7	AMIRUDDIN,ST	PENATA TK.I III/d	KASUBBID PENDATAAN	S1	PNS.D
	NIP. 19721219 200312 1 005		EVALUASI & UDKP		
8	STEPANUS TIBE PABORONG	PENATA TK.I III/d	KASUBBID BANTUAN	SMA	PNS.D
	NIP. 19660927 198903 1 001		PEMBANGUNAN		
9	ANDI JUSRIANI, S.IP	PENATA TK.I III/d	KASUBBID PEMDES	S1	PNS.D

	NIP. 19760701 200604 2 023		& PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASY.		
10	ABDURAHIM NIP. 19630704 199203 1 010	PENATA III/c	KASUBID SARANA & PRASARANA	STM	PNS.D
11	Hj. SUHARTI. S.Sos NIP.19690501 200701 2 027	PENATA TK.I III/d	KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM & PELAPORAN	S1	PNS.D
12	Hj. RINI SUNARY WULAN NIP.19670818 199308 2 001	PENATA III/c	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	SMA	PNS.D
13	JEMRI, S.IP NIP. 19810714 201001 1 011	PENATA III/c	KASUBBAG KEUANGAN	S1	PNS.D
14	FERY WAHYUDI, S.Sos NIP.19850223 201001 1 006	PENATA III/c	KASUBBID TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)	S1	PNS.D
15	MILU NELI PARADA, A. Md NIP. 19770502 200502 2 003	PENATA MUDA III/a	PENGELOLA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA	D3	PNS.D
16	PARSINAH, A.Md NIP. 19771213 200604 2 008	PENATA MUDA III/a	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PEMDES)	D3	PNS.D
17	MUHAMMAD JUNAIDI NIP. 19810704 200204 1 005	PENGATUR TK.I II/d	PENGELOLA BARANG	SMA	PNS.D
18	MOHAMMAD SAHURI NIP.19820526 200701 1 007	PENGATUR TK.I II/b	FUNGSIONAL UMUM	SMA	PNS.D
19	MALLAPIANG NIP. 19770106	PENGATUR II/c	PENGELOLA TATA BANGUNAN UMUM	SMA	PNS.D

	200604 1 011				
20	HARJUNA	PENGATUR II/c	PEMBANTU BENDAHARA	SMK	PNS.D
	19780315 200604 1 012		PENGELUARAN		
21	SITI FATIMAH WAHYU NUSANTARI	PENGATUR II/c	BENDAHARA PENGELUARAN	SMA	PNS.D
	NIP. 19810124 200604 2 008				
22	MUHAMAD SAKAR	PENGATUR MUDA Tk.I. II/b	PENGADMIN PROGRAM	SMA	PNS.D
	NIP.19790310 200901 1 004		PEMERINTAH		
23	ASRIANSYAH	PENGATUR MUDA TK.I II/b	ANALIS MANAJEMEN	SMEA	PNS.D
	NIP. 19730707 201001 1 001		KOMPLIK		
24	DODY, A. Md	PENGATUR II/c	VERIFIKATOR ADMINISTRASI	D3	PNSD
	NIP. 19790815 201212 1 004				
25	ABDUL HALIDSYAH	PENGATUR MUDA II/a	PENGELOLA PROGRAM & KEGIATAN PENDAPATAN	SMA	CPND
	NIP. 19760815 201212 1 003				
26	FAJRIN, ST	PENATA MUDA III/a	PENGAWAS TATA	S 1	PNSD
	NIP. 19840418 201403 1 003		BANGUNAN & PERUMAHAN		
27	MUHAMMAD EVENT ERLANGGA, SE	PENATA MUDA III/a	PENATA LAPORAN	S 1	PNSD
	NIP. 19880108 201403 1 001		PEREKONOMIAN		
28	ARNIS, SH	PENATA MUDA III/a	PENGERAK SWADAYA	S 1	PNSD
	NIP. 19860207 201503 1 004		MASYARAKAT PERTAMA		
29	M. SYUKUR. S.IP	PENATA MUDA III/a	ANALIS DESA/KELURAHAN	S 1	PNSD
	NIP.19810120 201503 1 001				
	LEONARDUS MARIO	PENATA MUDA III/a	PENGADMINISTRASI SARANA	S 1	PNSD

30	ISKANDAR, S.STP				
	NIP.19920214 201406 1 002		& PRASARANA		
31	MARSON	PENGATUR TK.I II/d	PELAKSANA	SMK	PNSD
	NIP.19770605 200112 2 003				
31	BOYLEE ABIA, SE	PENATA MUDA III/a	TEKNIS/ADMINISTRASI	S 1	CPNS
	NIP.19800220 201410 1 002		LAINNYA		
33	SURANI, ST	PENATA MUDA III/a	TEKNIS/ADMINISTRASI	S 1	CPNS
	NIP.19750206 201410 2 002		LAINNYA		

Sumber :Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Numukan

3. Keadaan Demografi

Pendudukdi Kelurahan Tanjung Harapan terdiri dari berbagai macam suku dimulai dari yang terbanyak yaitu suku Bugis, Timor, Jawa, Batak, Mandar, Toraja dan lain-lain, berikut jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Harapan:

JumlahPendudukKelurahan Tanjung Harapan per. Desember 2017

RT	RW	Penduduk			RumahTangga (KK)
		Laki- laki	Perempuan	Jumlah	
01	01	173	157	330	84
02	01	96	70	166	43
03	01	135	141	176	69
04	02	138	125	263	49
05	02	140	147	287	52
06	02	146	115	261	58
07	02	131	140	271	43
08	02	136	150	286	48
09	01	152	148	300	57
10	01	144	143	287	70
11	01	223	175	398	88
Total		1,614	1,511	3,125	661

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Harapan

Dari tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Tanjung Harapan terbesar berada di RT. 11 (398 jiwa), RT. 01 (130 jiwa), RT.09 (300 jiwa) dan yang terkecil berada di RT. 02 (166).

Di Kelurahan Tanjung Harapan terdapat penamaan suatu wilayah atau Kampung yang merupakan titik konsentrasi pemukiman antara lain Mamolo, Kampung Timur, Kampung Tengah, Sei Lancang, Sei Mangkadu dan Gunung Kambing namun konsentrasi penduduk terbanyak terdapat di Kampung Mamolo yang terdiri dari 6 (Enam) RT yaitu RT 01, 02, 03, 09, 10 dan 11.

**Jumlah Penduduk Menurut Usia
di Kelurahan Tanjung Harapan Desember 2017**

RT	USIA				
	Lansia	Dewasa	Remaja	Anak-Anak	Balita
01	10	95	10	27	16
02	8	79	12	43	3
03	18	140	25	97	10
04	18	116	20	50	23
05	13	84	16	28	4
06	28	81	76	62	22
07	16	127	27	36	3
08	10	126	32	47	10
09	26	104	14	31	20
10	27	213	29	52	6
11	12	210	25	76	24
Total	168	1,375	286	549	154

Sumber Kantor Lurah Tanjung Harapan

NB : Lansia : 50 Tahun keatas Anak-anak : 5-10 Tahun
 Dewasa : 17-50 Tahun Balita : 0-5 Tahun
 Remaja : 10-17 Tahun

Penduduk Kelurahan Tanjung Harapan Berdasarkan Status(Kawin)

RT	Kawin	Belum Kawin	Duda/Janda (Cerai)	KET.
01	183	198	10	
02	75	114	2	
03	122	135	12	
04	77	122	-	
05	89	112	-	
06	95	151	10	
07	105	118	-	
08	88	117	2	
09	96	92	11	
10	122	140	-	
11	121	137	-	
Jumlah	1,173	1,436	47	

Jumlah Penduduk Dengan Pemeluk Agama Di Kelurahan Tanjung Harapan

Tahun 2017

RT	Agama					
	Islam	Kristen Khatolik	Kristen Protestan	Hindu	Budha	Kanghucu
01	312	10	-	-	-	-
02	455	-	-	-	-	-
03	299	3	-	-	-	-
04	227	-	-	-	-	-
05	145	-	-	-	-	-
06	269	-	-	-	-	-
07	207	-	2	-	-	-
08	225	-	-	-	-	-
09	157	41	-	-	-	-
Total	2.296	54	2	-	-	-

Sumber: Kantor Lurah Tanjung Harapan

4. Karakteristik Informan

Berikut adalah karakteristik menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.

a. Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	6	85,71%
Perempuan	1	14,28%
Jumlah	7	100 %

Sumber: diolah dari data primer, Januari 2018

Distribusi informan tentang jenis kelamin berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 6 orang berjenis laki-laki atau sebesar 85,71% persen dan 1 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 14,28% persen dari keseluruhan informan yang ada.

b. Karakteristik informan berdasarkan umur

Penelitian ini menggunakan karakteristik informan berdasarkan umur. Karakteristik informan ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 8 Karakteristik Informan Berdasarkan Umur.

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
26 – 36	2	28,57%
37 – 46	3	42,85 %
47 – 56	1	14,28 %
57 tahun ke atas	1	14,28 %
Jumlah	7	100 %

Sumber : diolah dari data primer, Januari 2018

Tabel tersebut diatas memperlihatkan distributor informan berdasarkan umur dimana menerangkan bahwa kebanyakan informan memiliki umur yang berkisar 37-46 tahun yang menunjukkan sebanyak 3 orang informan atau 42,85 persen dari jumlah informan, informan yang memiliki umur sekitar 26-36 tahun sebanyak 2 orang atau 28,57 persen, informan yang berumur 47-56 tahun sebanyak 1 orang atau 14,28 persen serta informan yang berusia 57 tahun ke atas sebanyak 1 orang atau 14,28 persen dari keseluruhan jumlah informan yang ada.

c. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian menurut tingkatpendidikannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
S1	1	14,30%
S1	1	14,30%
D3	1	14,28%
SMA	1	14,28%
SMP	1	14,28%
SD	1	14,28%
Jumlah	7	100 %

Sumber : diolah dari data primer, Januari 2018

Distribusi informan berdasarkan tingkat pendidikannya menerangkan bahwa 2 orang berpendidikan S1 atau sebanyak 28,60% persen dari jumlah informan, tingkat pendidikan D3 sebanyak 1 orang atau 14,28% persen dari jumlah informan yang ada tingkat pendidikan informan yang SMA sebanyak 1 orang atau 14,28% persen dari jumlah informan yang ada. Tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang atau 14,28% persen dari jumlah informan yang ada. Tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang atau 14,28% persen dari jumlah informan yang ada.

d. Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan

Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian menurut pekerjaan yang dapat ditunjukkan pada table dibawah ini:

Tabel 10. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan.

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
PNS	2	28,57%
HONOR	1	14,28%
MASYARAKAT	4	57,15%
Jumlah	7	100 %

Sumber : diolah dari data primer, januari 2018

Distribusi informan tentang pekerjaannya berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 2 orang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau 28,57 persen dari jumlah informan, 1 orang informan berprofesi sebagai pegawai honor atau 14,28 persen dari jumlah informan, dan sisanya masyarakat Jumlahnya 4 orang atau 57,15 persen dari jumlah keseluruhan informan yang ada.

e. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendapatannya

Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian berdasarkan pendapatan perbulan juga sangat dibutuhkan dalam pengolahan data. Karakteristik informan berdasarkan pendapatan perbulan dapat ditunjukkan pada tabel sebagai Berikut:

Tabel 11. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendapatannya

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
Rp.3.600.000-Rp.4.000.000	2	28,57%
Rp.300.000 -Rp. 1.000.0000	1	14,28%
Rp.1.100.000-Rp.3.500.000	4	57,15 %
Jumlah	11	100 %

Sumber: diolah dari data primer, Januari2018

Distribusi informan tentang pendapatan perbulan berdasarkan tabel diatas yaitu menunjukkan bahwa informan yang berpenghasilan sebesar Rp.3.600.000-Rp 4.000.000 sebanyak 2 orang atau 28,57 persen dari jumlah informan,Rp.300.000-Rp.1.000.000 dan informan yang berpenghasilan sebanyak 1 orang atau 14,28 persen Rp.1.100.000-Rp.3.500.000 sebanyak 4 orang atau 57,15 persen dari jumlah informan yang ada.

b. Hasil Penelitian Berdasarkan Empat Indikator Yang Digunakan

1. Keputusan Dan Inisiatif

Keputusan dan inisiatif merupakan hal penentu dalam melakukan sebuah usaha pemberdayaan khususnya pemberdayaan masyarakat pesisir sangatlah dipengaruhi sejauh mana pengambilan keputusan dan inisiatif yang diambil oleh pihak dinas pemberdayaan masyarakat dalam melihat potensi dan peluang untuk memberdayakan masyarakat pesisir dengan ini peneliti menggunakan indikator tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat beliau mengemukakan bahwa :

“ Salah bentuk inisiatif kami yang juga membantu masyarakat pesisir yaitu kami membagikan raskin kepada setiap kelurahan dan kemudian keluarahan itulah yang membagikan kepada masyarakat, kami hanya memantau perkembangan apakah ada kebutuhan lain yang dibutuhkan masyarakat atau tidak” (Wawancara JM 4 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama selaku kepala dinas pemberdayaan masyarakat maka dapat dikatakan bahwa dari segi pengambilan keputusan dan

inisiatif yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan dan desa masih perlu ditingkatkan karena mereka hanya berpatokan pada satu kegiatan saja, mereka tidak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan melakukan inovasi yang bisa membantu peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

Lanjut wawancara bersama selaku Kepala Desa Tanjung harapan beliau memberikan pemaparan yang sejalan dengan informan sebelumnya beliau mengatakan bahwa :

“ Kalau kita melihat selama ini kinerja para pegawai dinas pemberdayan masih kurang maksimal dan butuh perbaikan, karena selama ini kami belum melihat adanya program-program yang diadakan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat, selain itu mereka juga kurang di dengar oleh masyarakat sekitar khususnya masyarakat pesisir” (wawancara MT 5 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama MT selaku kepala desa maka dapat disimpulkan bahwa para pegawai dinas pemberdayaan masyarakat dan desa belum memiliki inisiatif yang baik dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir ini terlihat karena kurangnya program-program yang ditawarkan kepada masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan sehari.

2. Memperkuat Kemampuan Masyarakat

Indikator tersebut sangatlah berperan penting kerana merupakan hal yang mendasar apabila kita ingin meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat peisir yang ada di Kabupaten Nunukan potensi masyarakat yang beraneka ragam haruslah diasah dengan diasah agar kemampuan tersebut bisa digunakan dalam keseharian.

Berdasarkan hasil wawancara bersama selaku sekretaris Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa mengatakan bahwa :

“ Dalam rangka memperkuat kemampuan masyarakat kami melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan cara memberikan nasehat kepada masyarakat pesisir agar memanfaatkan kekayaan alam yang ada di kabupaten Nunukan Selatan karena daerah kita dari segi budi daya perairan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila di olah dengan baik” (Wawancara BD 4 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa maka dapat dikatakan bahwa dinas pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab melakukan pemberdayaan, tetapi hal tersebut belum melakukan tugasnya dengan baik hal ini terbukti mereka hanya memberikan nasehat, harusnya mereka memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat pesisir agar mereka dapat berdaya dari segi pengetahuan dan keterampilan memanfaatkan kekayaan laut.

Lanjut hasil wawancara bersama selaku masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan beliau mengatakan bahwa :

“Kami belum pernah melihat pihak dinas pemberdayaan masyarakat melakukan sosialisasi maupun mengadakan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat pesisir, tetapi kami pernah mendapatkan pembagian raskin dari pihak dinas yang dibagikan oleh Kelurahan Tanjung Harapan, tetapi kami perlu pelayanan yang lebih untuk melancarkan kegiatan kami sehari-hari.(Wawancara RN 7 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat maka dapat dikatakan bahwa pihak pemerintah kabupaten Nunukan khususnya dinas pemberdayaan masyarakat belum memperlihatkan kinerja yang maksimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena tidak ada sosialisasi maupun pelatihan yang

dilakukan, sementara masyarakat sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dalam memanfaatkan hasil laut di Nunukan Selatan.

3. Toleransi

Toleransi merupakan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antara individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi sekalipun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat.

Hasil wawancara bersama selaku sekretaris desa beliau mengemukakan tentang toleransi yang diperlihatkan oleh pihak dinas pemberdayaan masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“ Kalau kami melihat toleransi para pegawai dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sudah cukup baik mereka terkadang melakukan bincang-bincang dengan masyarakat tentang perkembangan atau keadaan masyarakat pesisir, (Wawancara MA 8 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Harapan maka dapat dikatakan bahwa dari segi toleransi yang di perlihatkan sudah cukup baik karena pihak dinas pemberdayaan masyarakat telah melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitar salah satu langkah yang diambil dengan melakukan diskusi bersama masyarakat sekitar dalam hal keadaan masyarakat peisisir, tetapi toleransi yang baik itu belum cukup untuk melakukan peningkatan pemberdayaan

Lanjut hasil wawancara bersama selaku masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir beliau mengatakan bahwa :

“Kami melihat toleransi yang cukup baik yang dimiliki oleh para pegawai dinas pemberdayaan masyarakat karena setiap kami melakukan usaha atau kegiatan, pihak dinas selalu memberikan dorongan kepada kami kalau kami ingin mengembangkan usaha-usaha (wawancara RN 8 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama RN selaku masyarakat pesisir maka dapat disimpulkan bahwa toleransi yang dimiliki oleh pihak dinas pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik tetapi toleransi yang baik belum cukup apabila tidak didorong dengan program-program dan pelatihan yang dilakukan demi peningkatan kemampuan masyarakat pesisir.

4. Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar ini dibutuhkan antara dinas pemberdayaan dengan masyarakat baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki.

Hasil wawancara bersama selaku kepala dinas pemberdayaan masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“ Yang kami lakukan adalah melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk melakukan diskusi tentang perkembangan hasil laut dan permasalahan masyarakat pesisir lainnya dari situ kami memberikan proses belajar mengajar dengan memberikan arahan dan masukan tentang bagaimana cara memanfaatkan hasil laut yang ada di kecamatan Nunukan (Wawancara JM 8 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan JM selaku kepala dinas pemberdayaan masyarakat maka dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar yang diberikan sudah cukup baik tetapi proses belajar mengajar haruslah dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar masyarakat dapat berdaya dengan adanya pelatihan tersebut.

Lanjut hasil wawancara dengan selaku kepala desa beliau mengatakan bahwa :

“ Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pihak dinas pemberdayaan masyarakat dengan masyarakat pesisir kurang berjalan dengan baik karena tidak ada pertemuan yang dilakukan secara rutin agar semua masyarakat bisa memberikan masukan kepada pihak dinas

pemberdayaan begitupun sebaliknya, maka perlu ada program yang diranacang agar setiap pihak bisa memberikan masukan dan arahan. (Wawancara MT 6 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama MT selaku kepala desa maka dapat disimpulkan bahwa harus ada pertemuan yang dilakukan secara rutin agar semua pihak bisa memberikan masukan yang sifatnya membangun serta bisa membuat masyarakat pesisir berdaya dengan memanfaatkan budidaya perairan yang ada di wilayah tersebut.

c. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan

Beberapa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat pesisir sesuai realita yang penulis dapatkan dari lapangan berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara mendalam diantaranya :

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah Potensi Budidaya Perikanan. Kelurahan Nunukan Selatan memiliki potensi sumberdayaperikanan budidaya yang terdiri dari tambak seluas 25 ha, kolam 2.31ha, laut 406.14 ha. Pada tahun 2010 ini lokasi tersebut telah dimanfaatkan dengan berbagai jenis Komunitas. Ini menunjukkan komunitas rumput laut merupakan komunitas perikanan yang unggul dan memiliki kualitas yang baik hal ini sudah dibuktikan dengan kualitas rumput laut Kabupaten Nunukan adalah salah satu rumput laut yang terbaik di Asia Tenggara. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan yang memberikan pemaparan tentang keunggulan budidaya perikanan di Kabupaten Nunukan

Berdasarkan hasil wawancara bersama selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan

“ Beberapa keunggulan yang dapat kita manfaatkan di daerah kita Nunukan adalah keunggulan budidaya perairan yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat di semua kalangan khususnya masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan keunggulan tersebut dapat kita lebih gali dan inovasikan agar lebih memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan hasil laut di Kabupaten Nunukan ” (wawancara dengan JM 4 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan JM selaku kepala badan pemberdayaan maka penulis dapat mengemukakan bahwa salah satu faktor pendukung dalam memberdayakan masyarakat pesisir adalah keunggulan budidaya perairan yang dapat dimanfaatkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat Nunukan khususnya masyarakat yang tinggal di bagaian pesisir yang telah menjadikan perikanan sebagai mata mencarահarian tetap.

Lanjut hasil wawancara dengan selaku sekretaris di kantor pemberdayaan masyarakat dan desa beliau mengemukakan pendapat yang hampir serupa dengan informan sebelumnya beliau mengatakan bahwa :

“ Kita patut bersyukur kerana di kampung kita ini sudah maju budidaya perairannya sehingga lebih memudahkan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir tetapi yang menjadi masalah adalah kurangnya peralatan atau sarana dan prasarana yang digunakan baik itu petugas pemberdayaan masyarakat maupun alat-alat yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas.”(wawancara BD 4 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan BD selaku sekretaris di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka dapat dikemukakan bahwa wilayah Nunukan khususnya wilayah pesisir telah di unggulkan dari segi budidaya perairan sebagai lahan mata pencaharian masyarakat. Tetapi, dari segi sarana yang menjadi kebutuhan pokok bagi para nelayan belum dapat dipenuhi oleh

dinas pemberdayaan masyarakat selaku pemerintah yang harusnya menyediakan semua kebutuhan masyarakat agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar.

Hasil wawancara dengan selaku masyarakat sebagai nelayan beliau memberikan pernyataan bahwa :

“ Kami sebagai nelayan sebenarnya butuh di berikan arahan dan diberikan masukan serta diberikan bantuan karena dari segi sumber daya manusia masih banyak masyarakat pesisir Nunukan yang belum mampu memanfaatkan peluang yang ada, oleh karena itu kami butuh semacam penyuluh yang meberikan pemahaman kepada kami agar pengetahuan kami bisa lebih meningkat “(wawancara YN 5 januari 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama YN selaku masyarakat yang tinggal di daerah pesisir maka dapat di katakan bahwa perlu ada program-program yang disusun oleh pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya kelautan sebagaimana mestinya karena masyarakat Nunukan bagian pesisir secara kemampuan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan

2. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pesisir yang mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga setiap kegiatan masyarakat bisa terkendala atau terhambat dengan adanya beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan sehari-hari khususnya yang masyarakat Nunukan yang tinggal di wilayah pesisir.

Hasil wawancara dengan selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan beliau mengatakan bahwa :

“ Memang ada beberapa masalah yang kami hadapi yaitu kurangnya anggaran yang dimiliki oleh pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan desa karena kalau tidak ada anggaran maka kami akan kesulitan dalam membuat program yang tersusun secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Nunukan. (wawancara JM 2 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan JM selaku kepala badan pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan maka dapat dikatakan bahwa pihak dinas pemberdayaan masyarakat kesulitan dalam memberdayakan masyarakat karena kurangnya anggaran yang digunakan untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat yang hidup di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan

Lanjut hasil wawancara bersama selaku nelayan yang tinggal di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan beliau mengemukakan bahwa :

“ Kami disini sangat butuh dukungan dari pemerintah supaya kami tidak kesulitan dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari seperti jembatan, itu perlu diperhatikan oleh pemerintah karena itu adalah sarana penghubung ketika kami hendak pergi melaut, dan juga harusnya pihak dinas pemberdayaan masyarakat harus turun langsung kelapangan agar dapat melihat kebutuhan-kebutuhan yang perlu di perhatikan karena kalau tidak diperhatikan kami akan kesulitan kalau pergi melaut untuk kebutuhan sehari-hari kami. (wawancara MM 10 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan MM selaku nelayan yang tinggal di wilayah pesisir Nunukan maka dapat dikatakan bahwa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa selaku pemerintah cenderung lalai dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat kabupaten Nunukan. Dinas pemberdayaan masyarakat harusnya memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua masyarakat khususnya masyarakat pesisir yang masih banyak kebutuhan mereka yang belum

terpenuhi yang merupakan kebutuhan inti yang digunakan setiap hari oleh masyarakat ketika beraktivitas.

Lanjut hasil wawancara dengan selaku masyarakat yang juga berprofesi sebagai nelayan beliau mengatakan bahwa :

“Semua hasil tangkapan yang di dapat nelayan belum ada yang dapat menampung dengan jumlah yang banyak sehingga ketika hasil tangkapan masyarakat banyak, maka terkadang para nelayan tidak tahu mau dikemanakan ikan hasil tangkapan mereka. Maka pemerintah dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan permasalahan tersebut agar semua hasil tangkapan masyarakat bisa menjadi uang”(Wawancara YN 5 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama YN selaku masyarakat yang juga berprofesi sebagai nelayan maka dapat dikatakan bahwa harus ada tempat penampungan ikan yang memadai dalam artian bisa menampung ikan dalam jumlah yang banyak agar semua hasil tangkapan para nelayan tidak terbuang begitu saja. Maka pemerintah harus memperhatikan hal tersebut karena ini merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan.

B. Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan membahas terlebih dahulu bentuk-bentuk pemberdayaan

1. Bentuk pemberdayaan budidaya rumput laut

a) Pelatihan

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan memberdayakan masyarakat petani rumput laut melalui pelatihan yang di bagi menjadi 4 bentuk pelatihan. Yang pertama adalah presentasi metode pembudidayaan rumput laut dari awal proses budidaya hingga masa panen rumput laut, kedua adalah praktik pemasangan pondasi, ketiga adalah pelatihan pemasangan bibit dengan menggunakan tali dan botol bekas sebagai pelampungnya,

dan yang keempat adalah berupa jenis bibit yang tepat digunakan di perairan tertentu.

b) Pendanaan

Adapun pemberian bantuan pendanaan melalui APBD Provinsi dan APBD kota dapat membantu kebutuhan para petani rumput laut.

C) Pemasaran

Dinas Kelautan dan Perikanan harus berupaya untuk melaksanakan koordinasidengan menghubungkan petani rumput laut dengan perusahaan pengolahan rumput laut.

2. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Untuk meningkatkan kondisi perikanan dan memberdayakan nelayan, terutama nelayan miskin di wilayahnya, pemerintah Kabupaten sebaiknya melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a) Memberikan Bantuan Alat Tangkap

Bantuan alat tangkap adalah salah satu upaya paling penting untuk mensejahterakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggiran pantai khususnya para nelayan yang mata pencariannya dilaut

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dan pemeliharannya sangat tergantung kepada Pemerintah Kabupaten perlu menambah jumlah TPI di setiap kecamatan. Selain itu Pemkab perlu menyediakan anggaran untuk perawatan dan tambahan sarana prasarana lain sehingga kegiatan pelelangan di Kabupaten akan lebih lancar.

c) Pembinaan

pembinaan dan sosiasasi baik teknis maupun non teknis perlu ditingkatkan, baik pembinaan yang sifatnya rutin maupun pembinaan maupun sosialisasi yang insidental. Kelautan dan Perikanan saja namun juga harus melibatkan instansi-instansi terkait lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar dalam mengatasi persoalan yang cukup kompleks tidak

hanya diselesaikan secara sepihak dan untuk mencegah terjadinya konflik yang tak berujung. Misalnya pembinaan teknis penangkapan dan budidaya perikanan laut, pembinaan kehidupan sosial ekonomi, sosialisasi hukum dan perundang-undangan, serta pembinaan/ sosialisasi lainnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan yang membantu penyeleenggaraan lelang.

d) pemasaran

Untuk mengatasi kesulitan akses transportasi dan pemasaran hasil/produk perikanan diperlukan adanya koordinasi yang lebih intensif dan maksimal antar instansi terkait dengan perusahaan pelengan ikan.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan bahwa wilayah pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan adalah salahsatu wilayah dari Kabupaten Nunukan yang memiliki potensi sumberdaya perairan yang baik untuk mengembangkan usaha dibidang perikanan (budaya tangkap).Pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya perairan pantai di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan diarahkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya secara efektif,efesien,optimal, dan berkelanjutan melalui program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Di dalam penelitian ini, peneliti sudah melakukan observasi dan wawancara.Hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Kinerja Dinas pemberdayaan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.

menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat belum melaksanakan tugasnya dengan baik.Peneliti melihat masih banyak hambatan untuk melakukan program-program tentang pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya di

Kelurahan Tanjung Harapan. Tetapi disini masyarakat tidak boleh sepenuhnya menyalahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Karena salah satu faktor utama adalah kurangnya anggaran sehingga kegiatan atau program-program terkendala dan tidak dilaksanakan dengan maksimal.

2. Faktor-faktor Pendukung dan penghambat terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Harapan kabupaten Nunukan Berdasarkan hasil penelitian dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data skunder dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat menguatkan validnya hasil penelitian maka dapat disimpulkan dari dua sisi yaitu ada faktor yang mendukung dan ada faktor yang menghambat antara lain sebagai berikut :

1. Faktor pendukung

a. Potensi Budidaya Perikanan.

Kelurahan Nunukan memiliki potensi sumberdaya perikanan. lokasi tersebut telah di manfaatkan dengan berbagai jenis Komunitas. Ini menunjukkan komunitas rumput laut merupakan komunitas perikanan yang unggul dan memiliki kualitas yang baik hal ini sudah dibuktikan dengan kualitas rumput laut Kabupaten Nunukan adalah salah satu rumput laut yang terbaik di Asia Tenggara. Sehingga hal ini dapat digunakan pemerintah untuk lebih mudah dalam memberdayakan masyarakat pesisir.

b. Sosialisasi.

Dari proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan desa maka masyarakat pesisir sudah mengerti dan memahami secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan

program pengembangan budidaya rumput laut maupun penguatan modal dan usaha kelompok budidaya rumput laut oleh pelaku-pelaku pendukung

yaitu penyuluh dan masyarakat sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program. Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang program tersebut, maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja melainkan secara terus menerus sampai dengan akhir pelaksanaan program.

2. Faktor Penghambat

a. Partisipasi masyarakat yang kurang

Bahwa yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir. Sebagaimana mekanisme kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa pola partisipasi masyarakat memang sangat dominan dalam semua tahapan kegiatan program pemberdayaan masyarakat pesisir ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi. Dapat dilihat dari banyaknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibentuk masyarakat yang ada di setiap kelurahan. Oleh karena itu kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas bahwa program ini hanya bisa berhasil apabila mendapat respon dan perhatian dari masyarakat.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir ini yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih tergolong rendah dan perlu peningkatan melalui pelatihan agar semua masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan dapat mempunyai skill atau kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

c. Kurangnya anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir ini karena anggaran merupakan faktor penggerak seluruh elemen-elemen dari sebuah lembaga pemerintahan. Dalam pelaksanaan program penguatan modal dan usaha pemberdayaan masyarakat pesisir, serta penyuluh budidaya anggaran dasarnya dapat diperoleh dari Dana APBN pusat, DAK-DAU, DKP Propinsi Kalimantan Utara, dan Pemkab.

d. Minimnya Sarana dan Prasarana.

Keberadaan sarana dan prasarana dalam suatu dinas merupakan salah satu modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Dinas sehingga dengan adanya sarana dan prasarana tersebut tujuan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam (permandes no.3/2015, pasal 18) di antaranya menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan suwadaya dan gotong royong kepada masyarakat. Salah satu tugas pokok dinas pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana serta mendorong masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan. Peneliti mengobservasi dan wawancara informant untuk mengambil data. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan bahwa kurangnya anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Nunukan sehingga Dinas Pemberdayaan sulit dalam mengembangkan program-program yang telah tersusun secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas pemberdayaan kurang memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat pesisir yang berada di Kelurahan Tanjung Harapan. Sementara masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dalam mengelolah hasil laut di Nunukan Selatan.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah sebaiknya mengundang pihak swasta lebih banyak lagi untuk membangun industri pengolahan hasil atau lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian masyarakat pesisir sehingga hasil tangkapan

tidak hanya dijual mentah tapi dapat diolah menjadi produk-produk makanan ataupun kosmetik. Pihak Swasta diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha dan juga untuk mengambil peran dalam pengembangan industri perikanan karena kemampuan pemerintah dalam hal pemasaran yang terbatas.

2. Pemerintah perlu melakukan rekrutmen pegawai yang punya kapasitas dan kemampuan untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bagaimana cara memanfaatkan sumberdaya yang ada, melihat tenaga teknis ini sangat kurang.
3. Memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai bantuan program dan prosedurnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para masyarakat pesisir agar dapat mengembangkan budidaya perikananannya. Atau sumber daya yang lainnya.
4. Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang semaksimal mungkin maka ke depan perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat pesisir tergantung pada partisipasi seluruh stakeholders pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan selain itu keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan system pelaksanaan yang bottom up dengan senantiasa mempertimbangkan aspirasi dari bawah utamanya para nelayan atau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir

Kabupaten Nunukan sebagai objek pembangunan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA.

- Dahuri, Rokhmin, 2001, *Pengolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
Mikro-Kecil Bidang Kelautan dan Perikanan, Jakarta: USAKTI.
- David C, korten, 2013, *Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Journal
- Hikmat, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama.
- Moenir, H.A.S.,2001, *Manajemen Program Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mobyarto, et. Al. 2003, *Nelayan dan Kemiskinan. Antropologi di Desa Pantai*, Jakarta: Rajawali.
- Nontji, 2005, *Laut Nusantara*, Jakarta: Djambatan.
- Roesmidi, 2008, *Pemberdayaan masyarakat*, Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1996, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Yarsif Watanpone.
- Sugiyono, 2014, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: AlfabetaAdisasmito,
 Raharjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Suharto, Edi. 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Suharto, Edi. 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Bandung: Alfabeta.

Soetomo, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sianipar J,PG. 2000, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pattiasina, 2010, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU. NO. 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan.

UU.No. 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

PP. RI. No. 72 Thn 2005 Tentang Desa di tetapkan pada Tanggal 30 desember 2005. Ayat 1.

Pasal 8 UU.No.23 Thn 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<http://kamusbahasaindonesia.org/pemerintah> diakses pada tanggal 7 januari

<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master> diakses pada tanggal 29 januari 2017

<http:tadjuddin.its.ac/mandar/prog-peemp.html.com>. diakses pada tanggal 29 januari 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



JUSRIAH adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari seorang Ibu bernama Hj. Marale dan Ayah dari Rafiq sebagai anak ke empat dari empat bersaudara. Penulis di lahirkan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara pada tanggal 4 maret 1991. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 012 Desa Tanjung Harapan (*lulus tahun 2004*), melanjutkan MTS AL-IZZAH AL-AS'ADIYAH TOLAI Sulawesi Tengah (*lulus tahun 2010*) dan MADRASA ALIYAH AL-IZZAH AL-AS'ADIYAH TOLAI Sulawesi Tengah (*lulus tahun 2013*) hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul **"Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan"**.